

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG
ALAT PENGENDALI DAN PENGAMANAN PENGGUNA JALAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Royan Anzana

NPM: 1621020503

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG
ALAT PENGENDALI DAN PENGAMANAN PENGGUNA JALAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Royan Anzana

NPM: 1621020503

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag

Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan system pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *Imammah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah Dusturiyah*. Terkait Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam sarana dan prasarana perhubungan merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mengoptimalkan semua aset perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung. UPTD (unit pelaksanaan teknik dinas) jalan merupakan unsur penunjang sebagai tugas Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dibidang pengawasan pengendali pengguna jalan.

Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. *Kedua*, bagaimana implementasi peraturan tersebut jika dikaji melalui *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil penelitian ini terkait Implementasi Permenhub Nomor PM 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang tidak semestinya dalam pengawasan sudah dilaksanakan oleh pengendalian dan pengawasan Dinas Perhubungan, tetapi pada pelaksanaanya kurang maksimal. ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu seorang pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya yang terdapat didalam QS. An-Nisa: ayat 58. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia-akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran seorang pemimpin dalam konsep *Al-Ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar *Syari'ah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royan Anzana
NPM : 1621020503
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) ”adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Februari 2021
Penulis,



Royan Anzana
1621020503



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018
tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*(Studi Pada Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Nama : Royan Anzana

NPM : 1621020503

Jurusan : Syariah

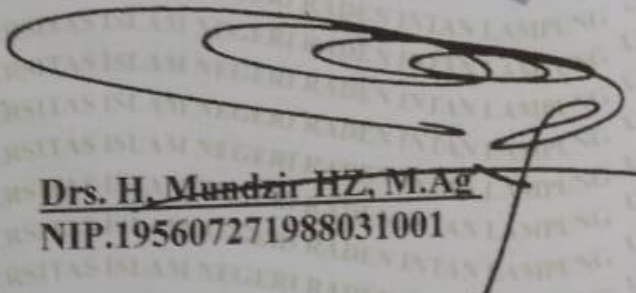
Fakultas : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

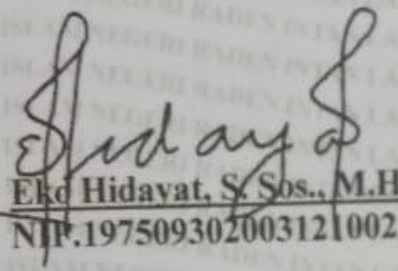
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II


Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag
NIP.195607271988031001


Eko Hidayat, S. Sos., M.H
NIP.197509302003121002

Ketua Jurusan,


Frenki M.Si
NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh **Royan Anzana, NPM : 1621020503** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag.M.H

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Drs.H. Mundzir HZ, M.Ag

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos, M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khamuddin, M.H
NPM.196210221993031002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa ayat:58)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat kekuatan kesabaran senyuman dan keikhlasan untuk diriku saya sangat berterima kasih kepada bapakku (Sugiarto) dan mamaku (Masyuna).



RIWAYAT HIDUP

Penulis seorang anak laki-laki bernama Royan Anzana, lahir pada tanggal 29-06-1997 di Tanjung Karang Bandar Lampung, sebagai anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Sugiarto dan Masyuna.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut

1. Taman Kanak-Kanak Amalia pada tahun 2002-2003
2. SD Negeri 1 Tanjung Senang Bandar Lampung pada tahun 2003-2009
3. SMP Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012
4. SMK Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015

Terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMHUB NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Hidayat, S.Sos.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Kepada Pimpinan dan karyawannya baik Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Ibu serta saudara kandungku yang selalu memberikan dorongan mental, doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus nya Anisa Meilia yang terkasih serta teman-teman lainnya di Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 3 Februari 2021
Penulis

Royan Anzana
1621020503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	18
1. Tinjauan Fiqh Siyasah	18
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	18
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	25
c. Tujuan Fiqh Siyasah	29

2. Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	48
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambar Umum Dishub Kota Bandar Lampung.....	53
1. Profil dan Sejarah	53
2. Visi dan Misi	54
3. Struktur dan Sumber Daya	56
4. Kebijakan Dishub Kota Bandar Lampung	59
B. Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permenhub Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang dibahas adalah **“Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul di atas serta untuk mengilustrasikan secara menyeluruh inti sari pembahasan ini, penulisan akan menegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan.¹ Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemtasi bukan

¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Gerasindo, 2002), h. 70

hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan.

2. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan terdiri atas alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar seperti speed bump, speed hump, speed table, pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas/delineator, palau lalu lintas, pita pengaduh, jalur penghentian darurat, pembatas lalu lintas.² Adapun batasan masalah penelitian ini pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Seperti yang tertuang pada pasal 1 angka (2) yaitu mengenai *Speed Hump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.³ sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan bahwa *Speed Hump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi. *Pertama*, terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa. *Kedua*, memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen *Ketiga*, memiliki kombinasi warna kuning atau

²Bagian Akhir Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018

³ Permenhub PM 82 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2

putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter⁴

3. Perspektif

Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁵

4. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah Dusturyah yaitu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya.⁶

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah proses Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturyah* (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) .

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

⁴Pasal 1 Angka 2 Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018

⁵Pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang, (On-line), tersedia di: www.definisimenurutparaahli.com (30 September 2020).

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 13

1. Alasan Objektif

Kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan perlu dibahas karena pelaksanaan kurang terkendali dengan baik dan masih banyaknya *Speed hump* yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan pembuatan *Speed hump* kajian meninjau pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dalam memberikan pengawasan yang baik dalam penyelenggaraan peraturan tersebut.

2. Alasan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Tata negara (*Siyasah*) fakultas Syariah (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam *Fiqh Siyasah* dikenal dengan istilah *Siyasah Dusturiyah*, yang berarti ilmu dalam hukum islam yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik

lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁷

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan system pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *Imammah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *Siyasah Dusturiyah*, yaitu *Siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyah* ini meliputi masalah-masalah *Imammah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, *Waliyul'ahdi*, perwakilan, *'ahlul halli wal aqli* dan *wazarah*.⁸

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media, 2014), h. 3

⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41

Dalam hal ini pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlu pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan. Alat pengamanan pengguna jalan terdiri atas: pagar pengamanan, cermin tikungan, patok lalu lintas, pulau lalu lintas, pita pengaduh, jalur penghentian darurat, dan pembatas lalu lintas. Serta alat pengendali pengguna jalan terdiri atas (alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar). Dalam penelitian ini yang dimaksud alat pengendali pengguna jalan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan yang dimaksud *speed bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dalam kecepatan operasional dibawah 10 (sepuluh) kilometer per-jam. *Speed hump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20 (dua puluh) kilometer per-jam. *Speed table* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyebrangan jalan (*raised*

crossing/raised intersection) dengan kecepatan operasional dibawah 40 (empat puluh) kilometer per-jam.⁹ Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan meliputi peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi.

Pada kenyataannya masih banyak *speed hump* yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Dengan adanya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya untuk ditaati dan dipatuhi. Akan tetapi pelaksanaannya kurang terkendali dengan baik dan masih banyaknya *speed hump* yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam sarana dan prasarana perhubungan merupakan lembaga yang sangat berperan dalam mengoptimalkan semua aset perhubungan yang ada di Kota Bandar Lampung. UPTD (unit pelaksanaan teknik dinas) jalan merupakan unsur penunjang sebagai tugas Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dibidang pengawasan pengendali pengguna jalan.

⁹Pasal 01 angka 1 PM 82/2018

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat: 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa ayat:58¹⁰)

Dalam hal ini Bahwa amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT.

Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijakan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.¹¹

¹⁰Departemen Agama Qur'an Surat An-Nisa 58 Yayasan Penyelenggaraan dan Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 2000, h.113

¹¹Wikipedia, Lalu Lintas. (Online). Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas. (diakses pada 7 Oktober 2020, pukul 8.19 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai pengaman pengguna jalan dan menelaahnya dalam bentuk skripsi dengan judul“ **Implementasi Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”**

D. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian Lexy J Moleong mengungkapkan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.¹² Dari penjelesaian latar belakang masalah di atas, bahwa penelitian ini akan terfokus pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dan melihat pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali

¹²Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44

dan Pengaman Pengguna Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana Implementasi peraturan tersebut jika dikaji melalui *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ?

F. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Adapun tujuan dan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang membuat pengaman seperti *speed hump* maupun pengguna jalan, serta memberikan pemahaman yang lebih mengenai pelaksanaannya sesuai dengan pokok-pokok yang terkandung dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sesuatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara suatu penelitian itu dilaksanakan.¹³ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian dilakukan pada objek Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui *staff* Dinas Perhubungan, yaitu *staff* bidang pengendali dan pengawasan Studi Dinas Perhubungan untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan.

¹³Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.21

¹⁴Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.2

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.¹⁶ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci data pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan

¹⁵Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

¹⁶Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

atau dari lokasi lapangan, penelitian ini dilakukan di Studi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan per undang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁸ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

¹⁷Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Peneliitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402

a. Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab kepada responden.¹⁹ Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview wawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang dinyatakan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, kepala bidang pengawasan dan kepala bidang perlengkapan bidang pengaman pengguna jalan.

b. Dokumentasi

dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.²⁰ Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²¹

¹⁹Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995), h.192

²⁰Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 274

²¹Burhan Sungin, *Penelitian kualitatif*, h. 125

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut.²³ Karena peraturan yang akan diteliti adalah termasuk bidang lalu lintas, dan pegawai dinas perhubungan pada bagian lalu lintas adalah 162 orang maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 162 orang dari bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

²²Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58

²³*Ibid*, h. 79

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Adapun pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, bila populasinya < 100 maka diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya > 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.²⁵

Sesuai penjelasan di atas sampel yang diperoleh dari jumlah populasi yaitu $162 \times 10\% = 17$. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 17 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau membuat kriteria tertentu. Penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penambahan sampel akan dihentikan ketika datanya sudah jenuh. Maksudnya, dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi.²⁶ Sehingga sampel yang dimaksudkan agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta cv, Cetakan ke 15, 2010), h.116

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif,....*, h.221

penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.²⁸ Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi paktual yang diperoleh dari aparaturn Dinas Kementrian Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.131

²⁸ *Ibid*, h. 127

yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.²⁹ *Fiqh* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”³⁰

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.³¹

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h.2

³⁰*Ibid*, h.3

³¹Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), h.9

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³²

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional).³³

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁴

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt., maupun yang

³²*Ibid*, h.10

³³*Ibid*, h.3

³⁴Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta:Gozian Press, 2013), h.49

berkaitan dengan hak-hak manusia.³⁵ Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendari tidak terdapat padanya nash-nash *syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.³⁶

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam,³⁷ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.³⁸ Sementara Lois Ma'luf

³⁵ *Ibid*, h.50

³⁶ *Ibid*, h.51

³⁷ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008), h.17

³⁸ *Ibid*, h.49

memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan.

Sedangkan makna *al-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut

a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

b. *Al-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.³⁹

c. Adapula istilah *al-siyasah al-syar'iyah* termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara.

Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definis beragam mengenai *al-siyasah syar'iyah* diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali.⁴⁰ Mengatakan, "*al-siyasah syar'iyah* adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan

³⁹*Ibid*, h.50

⁴⁰Beliau adalah Ali Bin 'Aqil bin Muhammad Abu al-Wafa' Al-Zhihari, salah seorang tokoh terkenal satu-satunya di jamannya, alim, penulis cerdas. Menulis kitab yang sangat masyhur, "*Al Funun*" lebih dari 400 jilid. Sayangnya beliau menyelisihi manhaj salaf dan sejalan dengan manhaj Mu'tazilah dalam banyak hal. Namun setelah itu beliau mengumumkan taubatnya dari manhaj Mu'tazilah serta menulis buku yang membantah mereka. Dalam Rapung Samuddin, h.50

tentangnya tidak disyari'atkan oleh Rasulullah saw. Dan tidak pula diturunkan wahyu.

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa *al-siyasah as-syar'iyah* merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil *syar'i* yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, "ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan *daulah islamiyah* berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari'at Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berbas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqaha* mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus itu.⁴¹

Definis yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta2001), h. 4

mengedepankan sisi ahlak dan sosial. Kedua, metode *fiqh syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:⁴²

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang Universal.

Berdasarkan segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasah syar'iyah* dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁴³

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al-musawwah*)

⁴² *Ibid*, h.6

⁴³ *Ibid*, h.7

- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*'adam al-haraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mufasid*)

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup hiidup kemasyarakatan, di sebut ayat *ahkam*.⁴⁴

Agama Islam, tidak hanya maslah Ubaidiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas, akan tetpi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *Fiqh Siayasah*.⁴⁵

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan *Fiqh Siyasa*, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). *Fiqh Siyasa*

⁴⁴Moch. Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No.12 Juli-Desember 2008, h.298. yang Mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.57

⁴⁵Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet.1, h.297-298

dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat *amali* melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan dan pengawasan.⁴⁶

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam al-Sulthaniyat* ada 5 (lima) macam:⁴⁷

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan):⁴⁸

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatann Undang-Undang)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qodhoiyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah khorijiyah syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)

⁴⁶Ali Syariati, Ummah dan Imamah: *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), cet.2, h.3

⁴⁷Pulungan, Suyuthi, M.A Prof. J. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Ombak. 2014), h.43

⁴⁸*Ibid*, h.43

- g. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah harbiyah syar'iyah* (Politik Peperangan).

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasahdusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *waliyatul ahdi*
- 5) Persoalan perwakilan
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqli*
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

- b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasioanal dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis

⁴⁹ Djazuli, Prof.H.A. *Fiqh Siyasah*, h.32

berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).⁵⁰ Ruang lingkup pembahasannya meliputi:⁵¹

- 1) Persoalan Internasional
 - 2) *Territorial*
 - 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
 - 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
 - 5) Masalah penyerahan penjahat
 - 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
 - 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi
 - 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hudud* dan dalam pidana *qishash*.
- c. *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.
- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
 - 2) Pengeluaran dan belanja negara
 - 3) Baitul maal dan fungsinya.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, ...h.251

⁵¹ Suyuti Pulungan, h.44

d. *Fiqh siyasah harbiyah*⁵²

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
- 2) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan
- 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Negara dengan ciri kekuasaan almiyah (*al-mulk at-taba'i*)
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyasi*).⁵³

Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu pertama, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Kedua, Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-'aqliyyah*), tipe ini hanya

⁵² *Ibid*, h.54

⁵³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h.13

mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan *siyasah al-madaniyyah*), merupakan satu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

c. Tujuan *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁵⁴

d. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pada penelitian ini kajian *fiqh siyasah* yang digunakan adalah *Dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkupnya pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

⁵⁴Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008) h.31

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:⁵⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
- h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:⁵⁶

- a. Dalil Kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, maqasidu syariah, dan mangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

⁵⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet.1, h.276

⁵⁶ H.A. Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47-48

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika fiqh siyasah dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

Kata-kata imam di dalam al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan kata imam menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti yang tidak baik.

Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar'i dan kedua bersifat siyasi.

Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta

baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁵⁷

Hak yang ketiga ini pada masa abu bakar, diceritakan bahwa setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya di beri gaji 6.000 dirham setahun,⁵⁸ dan menurut yang lain di gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.⁵⁹

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip pengajian (memberikan gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan untuk dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat dalam al-Qur'an.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*nya dan kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup

⁵⁷ Al- Mawardi, "*Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*", Musthafa al- 'Arabi al-Halabi, Mesir, h.15-16

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, "*Al islam Wa Audlo'una Asiyasiyasah Darul Qitab AL Arabi*" Al Qhahirah, 1951, h.189

⁵⁹ Yusuf Musa, "*Nidham al-Hukmi fi al-Islam*", Darul Kitabil Arabi, al-Qharirah, 1963, h.12

diakhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara para ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam menurut al-Mawardi antara lain:⁶⁰

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjajian damai dengan muslim.

⁶⁰ *Ibid.*, h.7

- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.⁶¹ Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusi, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain.

⁶¹Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi. 2012. *The Concept of Islamic Work Ethic: An Analysis of Some Salient Points in the Prophetic Tradition*. *International Journal of busines and Social Science*. Vol. 3 No. 20 [Special Issue-October 2012], h.141

Studi arabia, Pakistan, Brunei darussalam, Libya, Irak (konstitusi 1990) Maurintinia dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan dalam pasal 29 UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bai'at (mubayah'ah), pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.⁶² Bai'at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut: Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Anshor memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, "Saya nasihatkan kepadamu untuk membai'at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar". Di samping itu kata-kata bai'at dapat dibuat sesuai kebutuhan dan lingkungan asal tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip-prinsip Alqur'an dan sunnah Rasulullah.

Secara bahasa *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, 'Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli *Fiqh siyasah* merumuskan

⁶²T.M. Hasbi Siddiqy, "Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam" Matahari Masa Yogya, 11969, h.66

Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-ikhtiyar*⁶³, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-Ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-Ijti had*. Istilah yang lebih populer di pakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang di tunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahl-Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 138

mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁶⁴

Ada pendapat beberapa ahli mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*, yaitu:

- a. An-Nawawi dalam *Al-Minhaj* Ahl Halli waal 'Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- b. Muhammad Abdul menyamakan ahl al-hall wa al'aqdi dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59.⁶⁵ Ia menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau huku maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.⁶⁶
- c. Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi. Ia menyatakan kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut

⁶⁴ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta:Granit, 2004), h.74

⁶⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h.180

⁶⁶ *Ibid.*, h.181

Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.⁶⁷

d. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa.⁶⁸

e. Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

f. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.⁶⁹

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah *Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.⁷⁰

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawas atas

⁶⁷ Muhammad, *Dhiya al-Din al-Rasyid*, h. 167-168

⁶⁸ Muhammad Al-Razi, *Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, Tafsir Fakhr al-Razi, jilid Dar al-Fikr*, h.149

⁶⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, h.6

⁷⁰ Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), h. 208

kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.⁷¹

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : *“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”*.

Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turat fikih kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

⁷¹Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h.87

Ulil amri adalah istilah syar'i yang terdapat di dalam Al-qur'an. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara menegmbalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*.

Adanya dasar *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalimi, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.⁷² Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang

⁷²Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h.92

representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁷³

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);

- 1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijtima' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat yubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
- 2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- 3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- 4) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

⁷³Aratani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta:Granit, 2004), h.74

- 5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmih), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-nya atas seluruh agama.
- 7) Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
- 8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- 9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- 10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan menipu penasihat. Allah Ta'ala berfirman;

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah*” (Shad:26)

Pada ayat di atas Allah SWT tidak hanya memerintahkan pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan langsung. Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal itu ia lakukan, maka ia masuk kategori orang tersesat. Inilah kendati pelimpahan tugas dibenarkan hukum agama dan tugas pemimpin, ia termasuk hak politik setiap pemimpin. Para ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dan dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

Menurut Al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur

kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan mala yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).⁷⁴

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak yang menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat memepertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca ideranya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.⁷⁵

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi*. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka

⁷⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), h.5

⁷⁵ *Ibid.*, h.6

ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak independen. Ini mengakibatkan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqd* tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya.⁷⁶

Al-Mawardi hanya menjalankan proses pemilihan kandidat pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesedihannya. Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Kalau kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl al-ikhtiyar. Mereka melakukan bay'ah terhadap kepala negara terpilih untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.⁷⁷

Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*, h.7

⁷⁷Pandangan ini lebih maju beberapa abad sebelum pemikir-pemikir politik berat seperti John Locke, J. J. Rousseau dan Montesquieu merumuskan teori-teori kontrak sosial pada abad ke-17 dan 18 M

⁷⁸*Ibid.*, h.16

- a) Memelihara Agama
- b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
- c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
- d) Menegakkan hudud
- e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh
- f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah diajak
- g) Memungut harta *fa'i* dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
- h) Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
- i) Menyampaikan amanah.
- j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.

Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, AL-Mawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtatan dan melindunginya dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat Islam mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agama sekaligus.

Dengan demikian, agama mendapat perlindungan dari kekuasaan dan kekuasaan kepala negara pun berjalan dijalur agama.⁷⁹

Namun Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya umat taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terhadap salah satu dari tiga hal. Yaitu:⁸⁰

- (1) Menyimpang dari keadilan (berbuat fisik)
- (2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
- (3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.

Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut menjatuhkan kredabilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memegang jabatannya lagi. Namun demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi panca indra kepala negara tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan rakyat kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan, karena hal ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak mengakibatkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan rakyat kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan.

⁷⁹Al-Mawardi, *Abad al-Dunya wa al-Din*, Terjemahan Ibrahim Syu'aib, *Etika Agama dan Dunia*, h.100-101

⁸⁰*Ibid.*, h.102

Adapun hilangnya kemampuan mendengar bicara, menurut Al-Mawardi, masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian menghilangkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan tidak.

2. Peraturan Menteri Perhubungan pasal 1 angka (2) Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka (2) adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.⁸¹ sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan bahwa *Speed Hump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi⁸²

Pertama, terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa⁸³

Kedua, memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh)

⁸¹Pasal 1 angka 2 PM No. PM 82/2018

⁸²Pasal 3 angka 4 PM No.82/2018

⁸³Pasal 3 angka 4 huruf a PM No.82/2018

sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen⁸⁴

Ketiga, memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter⁸⁵

Dalam hal ini terlihat pada lingkungan Tanjung Seneng, Labuhan Dalam, area Sukabumi dan lainnya yg menurut penulis terlihat tidak sesuai dengan peraturan yang semestinya. Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengkaji melalui *fiqh siyasah* dusturiyah terhadap pengendalian oleh Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan penelitiannya. Setelah peneliti melakukan *research* terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian dimaksud antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Zannahdari UIN Raden Intan Lampung tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang” (Studi Di Terminal Rajabasa Tipe A)” Tujuan dari penelitian

⁸⁴Pasal 3 angka 4 huruf b PM No.82/2018

⁸⁵Pasal 3 angka 4 huruf c PM No.82/2018

ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang di terminal Rajabasa Tipe A dan untuk mengetahui Implementasi ditinjau dari Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang di Terminal Rajabasa Tipe A, masih belum baik dimana pengelolaan terminal penumpang Tipe A harus mampu mengelola dan bertanggung jawab dengan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang.

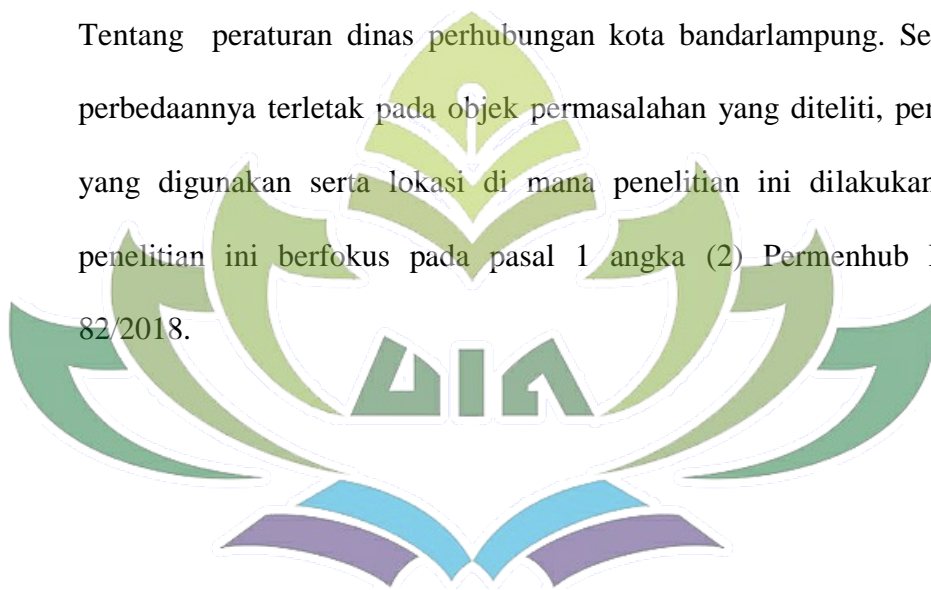
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Galang Dharma Joliandari UIN Raden Intan Lampung tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung dan perspektif Hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pungutan liar parkir di kota Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) bersifat *deskriptif* analisis metode yang digunakan adalah metode *deduktif*. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah melalui Dishub Kota

Bandar Lampung dalam pelaksanaan penanggulang pungutan liar parkir menggunakan dua metode yang bersifat Preventif dan Represif yaitu penanggulangan pungutan liar parkir baik sebelum dan sesudah terjadi. Penanggulangan ini dengan melakukan imbauan-imbauan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui persoalan-persoalan ini secara tuntas. Dan juga melakukan upaya-upaya pengawasan di setiap lahan parkir untuk mengurangi tindakan-tindakan pungutan liar parkir.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yunus UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)” Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam penerapan terhadap peraturan transportasi daerah kota Bandar Lampung Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan penyelenggaraan transportasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan Dinas Perhubungan belum sesuai terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi terdapat dalam pasal 99 yaitu (1) menunjuk Dinas Perhubungan atau dalam sebutan lain sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini; (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Bedasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti Tentang peraturan dinas perhubungan kota bandarlampung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang diteliti, pendekatan yang digunakan serta lokasi di mana penelitian ini dilakukan. Objek penelitian ini berfokus pada pasal 1 angka (2) Permenhub No. PM 82/2018.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika Cetakan ke-3.
- Al-Mawardi. *Abad Al-Dunya wa al-Din Terjemahan Ibrahim Syu'aib Etika Agama dan Dunia*.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyyah*. Mesir: al-'Arabi al-Halabi.
- Asikin, A. d. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Audah, A. Q. (1951). *Al Islam Wa Audlo'una Asiyasiyasah Darul Qitab Al Arabi*. Al Qhahirah.
- Azhari, M. T. (2003). *Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Djaelani, A. Q. (2004). *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Jakarta: Granit.
- Dzajuli, H. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasan, H. I. (2003). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasbi, A. (2004). *Musyawaharah dan Demokrasi*. Jakarta: Granit.
- Hasbi, A. (2004). *Musyawaharah dan Demokrasi*. Jakarta: Granit.
- Hidayat, S. d. (2002). *Metode Penelitian*. Dalam Syarifudin. Bandung: Manjar Maju.
- Ibnu Syarif, M. d. (2008). *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya media pratama.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Khaliq, F. A. (2005). *Fikih Politik islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khodir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Moloeng, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, Y. (1963). *Nidham al-Hukm fi al-Islam*. al-Qharirah: Darul Kitabil Arabi.
- Pulungan. (2014). *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Dalam Suyuthi. Yogyakarta: Ombak.
- RI, D. A. (1987). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Bandung: Cipta Media.
- Ridha, M. R. (Yogyakarta). *Tafsir Al-Manar*.
- Sahid, H. (2016). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Samudin, R. (2013). *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Siddiqy, T. H. (1969). *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian survai*. Dalam S. Efendi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Subagio, J. (1994). *Metode Penelitan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugioni. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis Cetakan ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarjo, A. (2006). *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*. Bandung: Kencana.
- sungin, B. (2011). *Pengertian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Susiadi. (2016). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Syariati, A. (2012). *Ummah dan Imamah Kontruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gerasindo.

Zada, K. (2008). *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

ARTIKEL

Wikipedia, Lalu Lintas.(Online). Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/lalu_lintas. (diakses pada 7 Oktober 2020. Pukul 8.19 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pengertian-Perpektif-atau-sudut-pandang, (Online), tersedia di www.definisimenurutparaahli.com (30 September 2020).

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 huruf a PM No.82/2018
 Pasal 1 angka 2 PM No.82/2018
 Pasal 3 angka 4 PM No.82/2018
 Pasal 3 angka 4 huruf a PM No.82/2018
 Pasal 3 angka 4 huruf b PM No.82/2018
 Pasal 3 angka 4 huruf c PM No.82/2018

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Iskandar Z selaku kepala bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.00 – 09.10

Hasil wawancara dengan Karlia Dirlangga selaku bidang seksi perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.15-09.20

Hasil wawancara dengan Ridotama selaku kepala bidang Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.25 – 09.30

Hasil wawancara dengan Selamat Sureger selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.31 – 09.33

Hasil wawancara dengan Fahrozi selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.35 – 09.40

Hasil wawancara dengan Turisman Efendi selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.41 – 09.45

Hasil wawancara dengan Heru Setiawan selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 09.50 – 09.55

Hasil wawancara dengan Arista Jaya selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 10.00. – 10.05

Hasil wawancara dengan Alharis selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 10.10 – 10.15

Hasil wawancara dengan Pipit Antariska selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 10.20 – 10.25

Hasil wawancara dengan Darmawan selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 21 desember 2020 Pukul 10.30-10.35

Hasil wawancara dengan Edi Yaman selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 04 januari 2021 Pukul 10.30-10.35

Hasil wawancara dengan Erpan selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 04 januari 2021 Pukul 10.35- 10.42

Hasil wawancara dengan Rohman selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 04 januari 2021 Pukul 10.50-10.55

Hasil wawancara dengan Rifa'i selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 04 januari 2021 Pukul 11.00-11.05

Hasil wawancara dengan Sideman selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 05 januari 2021 Pukul 10.00-10.05

Hasil wawancara dengan Asbat selaku SIE Dalwas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 05 januari 2021 Pukul 10.10-10.15